



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPERLITBANG
KABUPATEN KARANGANYAR

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KABUPATEN
KARANGANYAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dapat disusun dengan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Baperlitbang merupakan laporan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2023.

BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, realistis konsisten dan sinkron dengan pusat dan provinsi.

BAPERLITBANG sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama 1 tahun ini, sesuai dengan rencana dan anggaran. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis organisasi Baperlitbang. Hasil pelaksanaan diukur dengan indikator-indikator tertentu yang kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui kinerja organisasi.

Kami mengucapkan semua pihak yang telah mendukung dan kerjsama selama 1 tahun ini sehingga Baperlitbang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

Karanganyar, 11 Januari 2024



KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. GAMBARAN UMUM.....	I-2
C. DASAR HUKUM	I-6
D. MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI	I-8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	II-1
B. PERENCANAAN KINERJA	II-4
C. PERJANJIAN KINERJA	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. REALISASI ANGGARAN	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. SARAN	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar ASN PNS per Desember 2023	I-5
Tabel 1.2	Daftar ASN Non PNS per Desember 2023	I-5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.3	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023.....	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2023	II-8
Tabel 3.1	Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	III-1
Tabel 3.2	Kinerja Program Tahun 2023	III-2
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan 2023	III-3
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022 dan 2023	III-3
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 dan Target 2023 (akhir RPJMD).....	III-4
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2023 dan Target 2023 (akhir RPJMD).....	III-4
Tabel 3.8	Rincian Capaian Kinerja. Penyerapan dan Efisiensi Anggaran	III-6
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Baperlitbang	I-4
------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama lima tahun 2018-2023 Kabupaten Karanganyar telah menetapkan visi ” **Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**” dengan 6 tujuan strategis daerah salah satunya adalah ***Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik*** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, sinkron dengan pusat dan provinsi, realistis dan dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengatasi permasalahan / isu strategis daerah. Perencanaan dan penganggaran menjadi fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. dan urusan Penelitian dan Pengembangan. BAPERLITBANG merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAPERLITBANG menentukan tujuan strategis Perangkat Daerah adalah Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan 3 sasaran strategis OPD yaitu 1) Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif; 2) Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan, 3) Meningkatnya hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.

Di era Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum

Berikut ini adalah gambaran umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

B.1. Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Perencanaan OPD)
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Prasarana Wilayah)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pemerintahan dan Kependudukan)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial)
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga)
5. Kepala Bidang Ekonomi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pengembangan Dunia Usaha)

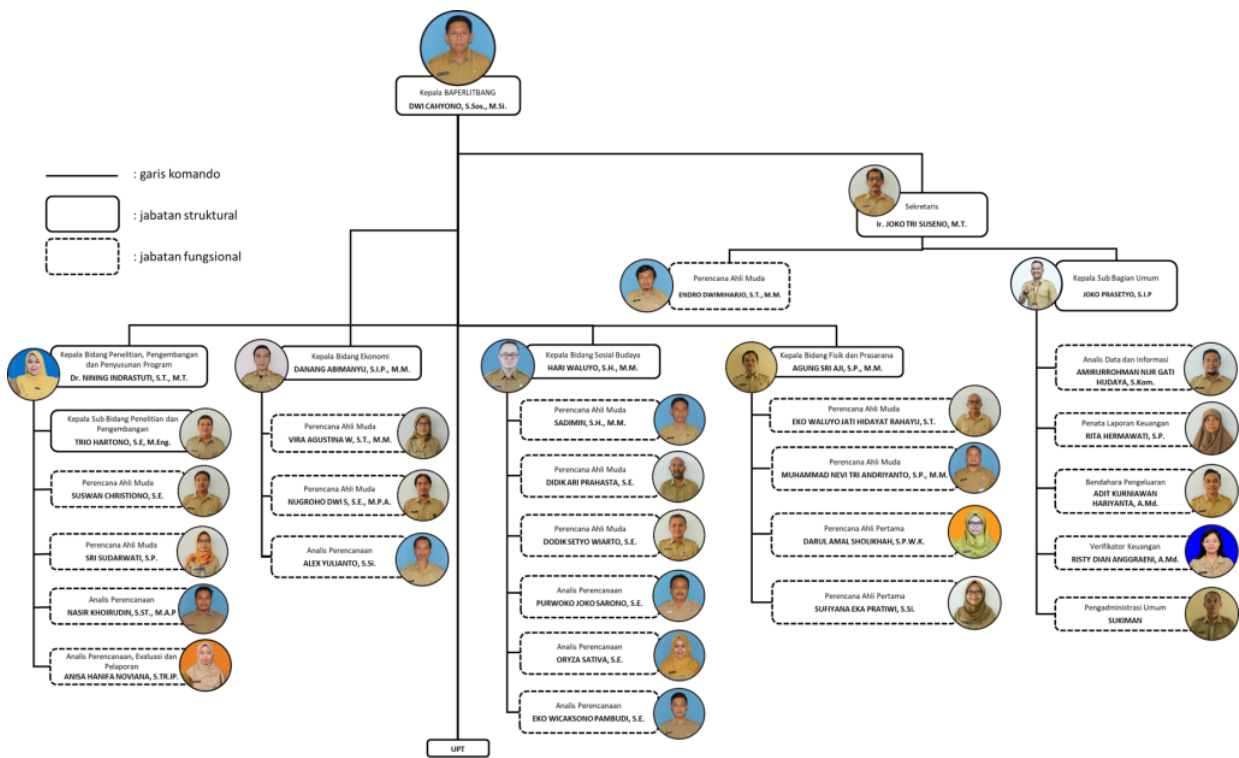
b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi)

6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program membawahkan :

a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

b. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan)
- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Penyusunan Program)



Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPERLITBANG

B.3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baperlitbang di Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pegawai yang terdiri dari PNS dan Non PNS, Jumlah Pegawai sebanyak 45 orang terdiri dari 31 PNS dan 14 orang Non PNS sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Daftar ASN PNS per Desember 2023

NO	NAMA	NIP	STATUS	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	19730614 199303 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	19671121 199803 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
3.	DANANG ABIMANYU, S.I.P., M.M..	19880406 200701 1 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
4.	AGUNG SRI AJI, S.P., M.M.	19731231 199903 1 022	PNS	Pembina (IV/a)
5.	Dr. NINING INDRIASTUTI, S.T., M.T.	19761026 200604 2 022	PNS	Pembina (IV/a)
6.	HARI WALUYO,S.H., M.M.	19701009 199803 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
7.	JOKO PRASETYO, S.I.P.	19880424 201101 1 009	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
8.	EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T.	19700923 199803 1 007	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
9.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	19781106 200501 1 005	PNS	Pembina (IV/a)
10.	MUHAMMAD NEVI TRI ANDRIYANTO, SP. MM.	19800413 200501 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
11.	SRI SUDARWATI, S.P.	19820602 200604 2 016	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
12.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	19781030 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
13.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	19840923 200902 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
14.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	19710830 200501 2 006	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
15.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	19840920 200902 1 004	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
16.	SADIMIN, S.H., M.M.	19660910 199203 1 009	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
17.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	19760202 200902 1 003	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
18.	DIDIK ARI PRAHASTA, S.E.	19810904 201001 1 012	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
19.	RITA HERMAWATI, S.P.	19710416 199603 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
20.	AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	19850607 201903 1 007	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
21.	SUKIMAN	19790423 200801 1 016	PNS	Juru tingkat I (I/d)
22.	SUFIYANA EKA PRATIWI, S.Si.	19941215 201903 2 022	PNS	Penata Muda (III/a)
23.	DARUL AMAL SHOLIAH, S.P.W.K.	19960624 201903 2 012	PNS	Penata Muda (III/a)
24.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	19870618 200912 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
25.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA., A.Md.	19841120 201001 1 018	PNS	Penata Muda Tk. I (III/b)
26.	ALEX YULIANTO, S.Si.	19770706 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
27.	PURWOKO JOKO SARONO, S.E.	19700830 200801 1 003	PNS	Penata Muda (III/a)
28.	ORYZA SATIVA, S.E.	19920212 202012 2 007	PNS	Penata Muda (III/a)
29.	EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI., S.E.	19951110 202012 1 006	PNS	Penata Muda (III/a)
30.	RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md.	19941004 202203 2 015	PNS	Pengatur (II/c)

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2023, diolah

Tabel 1.2.
Daftar ASN Non PNS per Desember 2023

NO	NAMA	NID NON PNS	NOMOR SK (KONTRAK)
1.	ABDUL QODIR NUGROHO	NONASN.19810801.0404	050/02 Tahun 2023
2.	ANDRI FUKUH PRASETYO	NONASN.19961105.0425	050/13 Tahun 2023
3.	HAFIDZ WILIKA AMAL, S.E.	NONASN.19921205.0361	050/08 Tahun 2023
4.	HETTY WIJAYANTIE, S.E.	NONASN.19830806.0373	050/11 Tahun 2023
5.	INNA SUCI RACHMAWATI, S.T.	NONASN.19840623.0925	050/03 Tahun 2023
6.	LISYANI NAVARI SUSANA, S.T.	NONASN.19890623.0417	050/07 Tahun 2023
7.	RATNA SIH INDRIANI, A.MD	NONASN.19891123.0350	050/09 Tahun 2023
8.	SRI SULARMI, S.P	NONASN.19870919.0400	050/05 Tahun 2023
9.	SUKARNO	NONASN.19790217.1024	050/04 Tahun 2023
10.	SUSANTO PRANOTO	NONASN.19680726.1034	050/06 Tahun 2023

NO	NAMA	NID NON PNS	NOMOR SK (KONTRAK)
11.	TRI JADI PAMUNGKAS, S.T.	NONASN.19920901.0420	050/12 Tahun 2023
12.	WAGIMAN	NONASN.19820929.0409	050/10 Tahun 2023
13.	MUHAMMAD AFIF MAULANA, S.PD.	NONASN.19940812.0342	050/18 Tahun 2023
14.	YONO WIDODO	NONASN.19820917.0395	050/14 Tahun 2023

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2023, diolah

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 56 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2023
13. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar No 050/073 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baperlitbang adalah :

- 1) menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2023;
- 2) mengumpulkan data dan informasi pencapaian indikator yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 3) menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi selama 1 tahun, yang dapat mempengaruhi pencapaian target indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari instansi / unit kerja dalam menjalankan misi dan atau mencapai tujuan organisasi. sehingga Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

- Semakin kritis dan terbukanya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
- Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang; usulan tidak pernah masuk DSP) yang berakibat asumsi masyarakat mengenai kegiatan Musrenbang hanya kegiatan formalitas saja

- Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Baperlitbang Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang; dan
6. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1. Rencana Strategis

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dapat diketahui tujuan strategis daerah salah satunya adalah **Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dapat diketahui tujuan dan sasaran strategis, salah satunya adalah tujuan dan sasaran strategis Baperlitbang di tahun 2023.

Tujuan strategis BAPERLITBANG adalah Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif;
- 2) Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditunjukkan dengan capaian target indikator kinerja utama (IKU) OPD yang telah ditentukan, di setiap tahunnya,

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	87,39	
	Sasaran				
1.1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	
1.2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	90	
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	88	
1.3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	50	
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	50	

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Indikator kinerja utama (IKU) OPD inilah yang akan dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja antara Kepala Baperlitbang dengan Bupati, setiap tahunnya. Dalam rangka mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut pada tahun 2023 telah direncanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan rencana alokasi anggaran dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2023, dengan alokasi dana Rp. 8.728.415.698.-

A.2. Rencana Kerja

Sebagaimana telah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, pada tahun 2023 Baperlitbang akan merencanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.449.566.698
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	124.148.000
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3 Dokumen	85.802.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.514.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.000.000
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	26.832.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.313.745.298
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bula	4.259.389.298
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	47.200.000
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	7.156.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.396.000
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.396.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	134.737.000
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 orang	115.372.000
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35 orang	6.365.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	311.549.400
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	12.242.000
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	14.825.400
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	15.400.000
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	14.087.000
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	2.760.000
18)	Penyediaan Bahan/Material	1 paket	15.155.000
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	27.825.000
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	190.478.000
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.947.100
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	9.830.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	121.962.500
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	121.962.500
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	168.337.000
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	22.767.000
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 laporan	96.250.000
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	49.320.000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	271.691.500
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	161.377.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	38.000.000
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	72.314.000
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		92%	1.108.000.000
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	833.000.000
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	833.000.000
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	20.000.000
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	20.000.000
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	255.000.000
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 laporan	235.000.000
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	20.000.000
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	1.545.000.000
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	525.000.000
34)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	158.828.000
35)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	22.411.000
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	323.496.800
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	510.000.000
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	125.715.200
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	36.565.000
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	347.719.800
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	510.000.000
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dokumen	215.000.000
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	40.000.000
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	255.000.000
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		50%	625.849.000
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	50%	625.849.000
43)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	625.849.000
4 Program, 15 Kegiatan, 43 Subkegiatan,			8.728.415.698

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2023

B. PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program kegiatan dan subkegiatan harus dinyatakan secara jelas kinerjanya dan dapat diukur atau dinilai capaiannya. Berdasarkan pada Renstra dan Renja Baperlitbang tahun 2023,

maka kinerja yang akan dicapai adalah Pencapaian indikator kinerja utama OPD yang berupa indikator tujuan dan sasaran OPD yang berupa :

- 1. Nilai AKIP = 87,39;
- 2. Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD = 100%
- 3. Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD = 100%
- 4. Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD = 90%
- 5. Persentase realisasi capaian RPJMD = 88%
- 6. Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah = 50%
- 7. Persentase inovasi yang diimplementasikan = 50%

Pencapaian target indikator tersebut diatas akan tergantung pada hasil pelaksanaan program, kegiatan da subkegiatan dengan indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	87,39
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 Dokumen
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan</i>	100%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 Orang
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Baperlitbang selama 1 tahun</i>	100%
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Baperlitbang selama 1 tahun	100%
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 <u>Dokumen</u>
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
18)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	100%
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	7 unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Umum selama 1 tahun	100%
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Baperlitbang	100%
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50 unit
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	92%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah	100%
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah	100%
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2 Laporan
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian konsistensi dan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional	100%
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%
34)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
35)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 Laporan
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 Laporan
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Laporan
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100%
15.	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti (dimanfaatkan)	50%
43)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Dokumen

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja secara lebih rinci dinyatakan dalam bentuk lampiran Pejanjian Kinerja Pegawai yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung. Secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2023

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Kepala Baperlitbang	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	%	89,39	Tujuan
		2) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	Sasaran
		3) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	Sasaran
		4) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	90	Sasaran
		5) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	88	Sasaran
		6) Persentase hasil kajian yang diimplemetasikan menjadi kebijakan daerah	%	50	Sasaran
		7) Persentase inovasi yang diimplemetasikan	%	50	Sasaran
2	Sekretaris Baperlitbang	8) Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100	Kegiatan
		9) Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Kegiatan
		10) Prosentase Dokumen Pengelolaan barang yang tersusun	%	100	Kegiatan
		11) Capaian Kinerja Pegawai	%	100	Kegiatan
		12) Prosentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Kegiatan
		13) Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan	%	100	Kegiatan

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
3	Kabid LitbangPP	14) Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	%	100	Kegiatan
		15) Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	Kegiatan
		16) Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%	100	Kegiatan
		17) Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah	%	100	Kegiatan
		18) Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah	%	100	Kegiatan
		19) Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti (dimanfaatkan)	%	50	Kegiatan
4	Kabid Sosbud	20) Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	Kegiatan
5	Kabid Ekonomi	21) Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	Kegiatan
6	Kabid Fispra	22) Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	Kegiatan
7	Kasubbag Umum	23) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Sub keg
		24) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		25) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Sub keg
		26) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	Sub keg
		27) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	35	Sub keg
		28) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		29) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	Sub keg
		30) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Sub keg
		31) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	Sub keg
		32) Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	Sub keg
		33) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	48	Sub keg
		34) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	Sub keg
		35) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		36) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	1	Sub keg
		37) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Sub keg
		38) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		39) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	Sub keg
		40) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	Sub keg
		41) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	Sub keg
		42) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Sub keg

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		43) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Sub keg
		44) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	
		45) Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	7	Sub keg
		46) Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	Sub keg
		47) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	Sub keg
		48) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	Sub keg
		49) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	Sub keg
		50) Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	50	Sub keg
		51) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Sub keg
9	Kasubbid Litbang	52) Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	dokumen	1	Sub keg

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Baperlitbang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pada 2 Urusan atau Bidang yaitu : Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang kami laporkan Capaian Kinerjanya.

Pengukuran capaian kinerja adalah mengukur capaian (realisasi) indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dibandingkan target indikator yang terdapat dalam Renja Perubahan OPD Tahun 2023, yang menjadi dasar perjanjian kinerja pegawai Baperlitbang.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

A.1. Kinerja sasaran strategis dan Program (perbandingan target dan realisasi)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	90	97,27	108
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	88	91,2	103,6
3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	50	57	114
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	50	75	150

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Tabel 3.2.
Kinerja Program Tahun 2023

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	87,39	Data belum ada	-
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	92	100	108
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	%	92	100	108
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Tabel 3.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2, dengan mengacu pada tabel 3.3. diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2023 adalah : **Sangat Tinggi**

A.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada

tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya (2022), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Kinerja		Status
			2022	2023	2022	2023	
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	100	100	100	100	Sama
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	100	100	Sama
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	83,48	97,27	97,07	108	Naik
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	89,00	91,2	103,49	103,6	Naik
3.	Meningkatnya hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	57	57	126,67	114	Turun
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	78,69	75	174,87	150	Turun

Sumber : Baperlitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.4 diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran Organisasi Baperlitbang Tahun 2023 adalah sama dibanding tahun 2022.

Tabel 3.5.
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022 dan 2023

No	Program	Indikator	Realisasi		Kinerja		Status
			2022	2023	2022	2023	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	70,25	Data belum ada	85,3	-	-
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	100	100	109,29	108	Turun
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	100	100	109,29	108	Turun
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100	100	100	100	Sama

Sumber : Baperlitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.5, diketahui bahwa kinerja program oleh Baperlitbang Tahun 2023 jika dibanding tahun 2022 adalah mempunyai kinerja lebih rendah. Tetapi semua target kinerja program tetap tercapai.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2023 dengan target akhir dalam Renstra atau RPJMD Tahun 2023. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas tidak di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 dan Target 2023 (Akhir RPJMD)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2023	2023	
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	100	100	Tercapai
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	Tercapai
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	97,27	90	Tercapai
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	91,2	90	Tercapai
3.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimple mentasikan menjadi kebijakan daerah	57	50	Tercapai
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	75	50	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2023

Tabel 3.7.
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2023 dan Target 2023 (Akhir RPJMD)

No	Program	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2023	2023	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Data belum ada	87,39	-
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah pro gram yang memenuhi target	100	92	Tercapai
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	100	92	Tercapai
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100	100	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.6 dan 3.7, diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2023 adalah Sebagian besar

sudah tercapai karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya. Khusus untuk nilai SAKIP Baperlitbang tahun 2023 data belum ada, sehingga belum dapat dievaluasi.

A.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang membutuhkan perbaikan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Masih belum meratanya beban pekerjaan / indikator kinerja yang tidak merata; (Ada jabatan yang belum mempunyai beban pekerjaan / kinerja yang terlalu banyak, sebaliknya ada yang sedikit);
- 2) Belum ada kejelasan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap indikator kinerja untuk level subkoordinator;
- 3) Perlunya kejelasan pohon kinerja dan crosscutting program kegiatan;
- 4) Tugas dan fungsi bidang belum tercermin dalam indikator yang ditetapkan, terutama terkait monitoring dan evaluasi bidang;
- 5) Indikator urusan kelitbang perlu dijelaskan dan dipastikan formulasnya sehingga dapat terukur dengan benar.

Dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan beberapa hal perlu dilakukan :

- 1) Perlu kesepahaman Bersama bagi perencana OPD terkait dengan indikator, perumusan (formulasi), leveling indikator (keterkaitan langsung), sehingga diperlukan diklat, bimtek atau workshop bagi perencana;
- 2) Penggunaan aplikasi yang sudah jadi (siap, lengkap, terukur, sederhana, mudah digunakan) agar dokumen perencanaan konsisten dan sinkron baik pusat, provinsi, daerah dan OPD;
- 3) Pemerataan beban kerja bagi pegawai (indikator kinerja numpuk pada satu bidang atau sub bidang); sebagai contoh beban pekerjaan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada 1 orang;
- 4) Perbaikan komunikasi eksternal maupun internal OPD karena dokumen perencanaan sampai pelaporan, sangat tergantung pada komunikasi antar bidang / sekretariat, antar OPD dan atau antar Pemerintah (pusat dan daerah).

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Bagian ini menganalisis sumberdaya yang dimiliki oleh Baperlitbang dengan indikator strategis yang ditetapkan dan capaian kinerja yang

dihasilkan. Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana Gedung kantor (peralatan, perlengkapan, gedung, kendaraan, telepon, listrik, air, internet dll) sudah mencukupi untuk kelancaran pegawai bekerja.

Keberadaan pegawai yang ASN sejumlah 30 orang, dirasakan kurang untuk mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari, meskipun sudah dibantu tenaga Non ASN sebanyak 14 orang. Sebagai sebuah Perangkat Daerah yang mempunyai keterlibatan pada semua urusan pemerintahan, keterkaitan dengan OPD, keberagaman acara dan kegiatan ketersediaan pegawai baik ASN dan Non ASN masih dirasakan kurang. Karena sebagian ASN akan terfokus pada pengelolaan keuangan, barang dan asset, serta kegiatan tambahan yang berasal dari pusat, provinsi ataupun dari OPD lain.

Dalam pencapaian kinerja Baperlitbang tahun 2023 diperlukan sumber daya anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai menjabarkan tugas dan fungsi Baperlitbang yaitu melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karanganyar. Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagaimana tabel 3.8 di bawah ini

Tabel 3.8.
Rincian Capaian Kinerja, Penyerapan dan Efisiensi Anggaran

No	Program	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran Rp	Efisiensi Anggaran (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	5.449.566.698	5.147.657.923	94,46%	301.908.775	5,54%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	1.108.000.000	1.091.174.751	98,48%	16.825.249	1,52%
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	1.545.000.000	1.534.175.876	99,30%	10.824.124	0,70%
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	625.849.000	619.605.656	99,00%	6.243.344	1,00%

Sumber : Baperlitbang, 2023, diolah

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan (No. 2, 3 dan 4 pada tabel diatas) untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sangat memuaskan yaitu 100% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran. Dikecualikan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (No. 1 pada tabel diatas) belum dapat diukur kinerjanya karena nilai SAKIP Baperlitbang tahun 2023 data belum ada.

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa indikator program dan kegiatan nilai menunjukkan angka atau nilai absolut, angka yang berdiri sendiri untuk tiap tahunnya, kecuali indikator nilai SAKIP, capai tahun sebelumnya akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Penentuan indikator dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang sering kali tidak berkaitan langsung atau bukan merupakan input bagi indikator di level berikutnya. Hal ini dapat mengakibatkan capaian kinerja seringkali tidak dipengaruhi oleh aktivitas pada level dibawahnya atau aktivitas yang ada tidak sesuai.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini Pada tahun 2023 realisasi anggaran adalah sebesar 96,15% atau Rp. 8.392.614.206,00

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
I.	<i>PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</i>	5.449.566.698	5.147.657.923	94,46%	ST
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.302.000	121.032.056	97,37%	ST
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	85.802.000	84.947.000	99,00%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.514.000	6.303.056	83,88%	T
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.800.000	95,00%	ST
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.832.000	25.982.000	96,83%	ST
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.313.745.298	4.062.050.494	94,17%	ST
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.259.389.298	4.010.107.794	94,15%	ST
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.200.000	44.992.500	95,32%	ST
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.156.000	6.950.200	97,12%	ST
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.396.000	3.388.400	99,78%	ST
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.396.000	3.388.400	99,78%	ST
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.737.000	123.976.350	92,01%	ST
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	1.650.000	55,00%	R
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	5.933.550	59,34%	R
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115.372.000	110.062.000	95,40%	ST
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6.365.000	6.330.800	99,46%	ST
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.549.400	294.767.656	94,61%	ST
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.242.000	12.236.025	99,95%	ST
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.825.400	14.787.400	99,74%	ST
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	15.400.000	15.308.000	99,40%	ST
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.087.000	14.058.959	99,80%	ST
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100,0%	ST
18)	Penyediaan Bahan/Material	15.155.000	15.138.200	99,89%	ST
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.825.000	22.207.000	79,81%	T
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.478.000	181.251.922	95,16%	ST
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.947.100	8.723.050	97,50%	ST
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.830.000	8.297.100	84,41%	T
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.962.500	117.016.100	95,94%	ST
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.962.500	117.016.100	95,94%	ST
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.337.000	156.936.842	93,23%	ST
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	22.767.000	22.680.100	99,62%	ST
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	96.250.000	84.936.742	88,25%	T
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.440.000	49.320.000	99,76%	ST
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.691.500	268.490.025	98,82%	ST
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.377.500	161.311.025	99,96%	ST
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000	36.074.000	94,93%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.314.000	71.105.000	98,33%	ST
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.108.000.000	1.091.174.751	98,48%	ST
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	833.000.000	818.466.310	98,26%	ST
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	833.000.000	818.466.310	98,26%	ST
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.999.000	100,00 %	ST
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.999.000	100,00 %	ST
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.000.000	252.709.441	99,10%	ST
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	235.000.000	233.048.550	99,17%	ST
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	19.660.891	98,30%	ST
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.545.000.000	1.534.175.876	99,30%	ST
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	525.000.000	521.274.524	99,29%	ST
34)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	158.828.000	158.213.973	99,61%	ST
35)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.411.000	22.351.500	99,73%	ST
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	343.761.000	340.709.051	99,11%	ST
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	510.000.000	507.306.132	99,47%	ST
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	125.715.200	125.635.489	99,94%	ST
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	36.565.000	35.714.843	97,67%	ST
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	347.719.800	345.955.800	99,49%	ST
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	510.000.000	505.595.220	99,14%	ST
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	215.000.000	214.599.990	99,81%	ST
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	39.731.250	99,33%	ST
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	255.000.000	251.263.980	98,53%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	625.849.000	619.605.656	99,00%	ST
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	625.849.000	619.605.656	99,00%	ST
43)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	625.849.000	619.605.656	99,00%	ST
	2 urusan 4 Program, 15 Kegiatan, 43 Subkegiatan	8.728.415.698	8.392.614.206	96,15%	ST

Sumber : Baperlitbang, 2023
ST = Sangat tinggi, T = Tinggi, R = Rendah

Berikut daftar subkegiatan yang realisasinya di bawah rata-rata 96,15% tersaji dalam table dibawah ini.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran dan Sub Kegiatan yang Kinerjanya di Bawah Rata-rata Relisasi Anggaran Baperlitbang

NO	SUB KEGIATAN	Realisasi (%)	Penyebab
1	2	3	
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	83,88%	1, 2
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95,00%	1, 2
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94,15%	3
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	95,32%	1, 2
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55,00%	1, 2
6	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	59,34%	1, 2, 3
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95,40%	3
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79,81%	2
9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95,16%	2, 4
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	84,41%	2
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,94%	5
12	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	88,25%	2
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,93%	2, 5

Adanya persentase serapan anggaran subkegiatan dibawah serapan anggaran total dikarenakan beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antar pegawai/bidang.
2. Asumsi awal saat perencanaan yang kurang tepat
3. Berkurangnya pegawai (PNS) di Baperlitbang
4. Faktor eksternal diluar Baperlitbang yang tidak bisa diprediksi besarnya (dapat dari OPD lain maupun daerah lain)
5. Nominal SPJ dibawah pagu anggaran karena proses pengadaan barang/jasa

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 merupakan laporan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2023.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dengan kinerja **sangat tinggi (sangat baik)**, dengan nilai **112,6%**. dan mencapai target indikator kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan baik capaian indikator maupun anggaran berada di atas 90%. Dengan membandingkan persentase kinerja anggaran dan pencapaian target indikator, secara singkat dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan secara efisien, sedangkan untuk efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan jumlah indikator sebanyak 66 buah, dan tenaga kerja yang ada, dapat dikatakan efektif.

Masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang membutuhkan perbaikan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Masih belum meratanya beban pekerjaan / indikator kinerja yang tidak merata; (Ada jabatan yang belum mempunyai beban pekerjaan / kinerja yang terlalu banyak, sebaliknya ada yang sedikit);
- 2) Belum ada kejelasan indikator kinerja ditanggungjawab oleh siapa untuk level (subkoordinator / kasubbid);
- 3) Perlunya kejelasan pohon kinerja dan crosscutting program kegiatan;
- 4) Tugas dan fungsi bidang belum tercermin dalam indikator yang ditetapkan, terutama terkait monitoring dan evaluasi bidang;
- 5) Indikator urusan kelitbang perlu dijelaskan dan dipastikan formulasinya sehingga dapat terukur dengan benar.

B. SARAN

BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat

Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, realistis konsisten dan sinkron dengan pusat dan provinsi. Dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan beberapa hal perlu dilakukan :

- 1) Perlu kesepahaman bersama bagi perencana OPD terkait dengan indikator, perumusan (formulasi), leveling indikator (keterkaitan langsung), sehingga diperlukan diklat, bimtek atau workshop bagi perencana;
- 2) Penggunaan aplikasi yang sudah jadi (siap, lengkap, terukur, sederhana, mudah digunakan) agar dokumen perencanaan konsisten dan sinkron baik pusat, provinsi, daerah dan OPD;
- 3) Pemerataan beban kerja bagi pegawai (indikator kinerja numpuk pada satu bidang atau sub bidang); sebagai contoh beban pekerjaan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada 1 orang;
- 4) Perbaikan komunikasi eksternal maupun internal OPD karena dokumen perencanaan sampai pelaporan, sangat tergantung pada komunikasi antar bidang / sekretariat, antar OPD dan atau antar Pemerintah (pusat dan daerah).